



POLITIK ANGGARAN DAN EFEKTIVITAS PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Edi putra¹; Hayatullah anjani²; Yurida wahyuni³;Nur Alisah⁴

*Manajemen ,Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia, Ilmu Pemerintahan ,
Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia, Farmasi, Universitas Megarezky
MakassarIndonesia.*

¹Correspondence Email:

edys98848@gmail.com¹hayatullahanjani@gmail.com²yudahwahyuni@gmail.com³alisa342@gmail.com.

Received: Filled Out by the Editor

Accepted: Filled Out by the Editor

Published: Filled Out by the Editor

Abstract

This study aims to examine the relationship between budget politics and the effectiveness of poverty alleviation programs in Indonesia using a *Systematic Literature Review* (SLR) approach. Although various studies have addressed the importance of budget allocation and governance, there remains a research gap in systematically integrating the roles of political actors, regional disparities, and institutional capacity in influencing the success of social programs. This study reviews articles from the *Dimensions* and *Scopus* databases published over the last ten years (2015–2024), with rigorous selection criteria to ensure the quality and relevance of sources. The findings reveal that weak fiscal allocation, low local institutional capacity, and elitist budget politics contribute to the failure of poverty alleviation programs in many regions. Furthermore, the potential of technology and the health system as instruments for poverty reduction has not been fully realized due to budgetary gaps and unintegrated policies. This research recommends budget reforms grounded in social justice, strengthened institutional capacity, and investments in digital infrastructure and public health as prerequisites for inclusive and sustainable poverty alleviation policies. The study is expected to provide empirical insights for policymakers in designing more adaptive and transformative fiscal interventions.

Keywords: *Govermnent Policy, Poverty, Budget Policy*

A. Pendahuluan

Salah satu penyebab kemiskinan yang sering luput dari perhatian dalam perumusan kebijakan adalah dampak bencana dan wabah penyakit, seperti pandemi Covid-19 yang mulai mengguncang Indonesia sejak akhir tahun 2019(Smith et al., 2025). Krisis kesehatan ini bukan hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan yang kehilangan akses terhadap pekerjaan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial. Dalam konteks tersebut, politik anggaran menjadi kunci dalam menentukan respons negara terhadap situasi krisis. Sebagai instrumen kebijakan publik, anggaran tidak hanya disusun melalui pertimbangan teknokratis, tetapi juga dipengaruhi oleh proses politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang saling bersaing. Seperti dijelaskan oleh Hamka et al. (2022), perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran merupakan proses yang sarat kepentingan politik dan bias kekuasaan. Ketika alokasi anggaran tidak diarahkan secara responsif dan adil untuk menghadapi dampak krisis seperti pandemi, maka potensi ketimpangan dan kemiskinan akan semakin dalam, mencerminkan kegagalan negara dalam menggunakan instrumen fiskal sebagai alat intervensi sosial yang efektif.

Efektivitas program pengentasan kemiskinan mengacu pada tingkat keberhasilan intervensi kebijakan dalam menurunkan angka kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi kelompok miskin. Dalam praktiknya, efektivitas ini sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan dan implementasi kebijakan, alokasi anggaran yang tepat sasaran, serta kemampuan institusi dalam menjalankan program secara akuntabel dan adaptif. Keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampaknya terhadap akses layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan perubahan sosial bagi kelompok rentan ((Maj-Waśniowska & Stabryła-Chudzio, 2020)

Berikut adalah narasi terpadu yang menyinkronkan kedua kutipan secara akademik dan koheren:

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kemiskinan menuntut analisis yang melibatkan berbagai faktor alamiah, ekonomi, struktural, sosial, dan budaya yang saling memengaruhi dalam membentuk kondisi kemiskinan (Pratama, 2023a). Dalam kerangka ini, politik anggaran memegang peran strategis sebagai alat kebijakan yang menentukan arah pembangunan melalui mekanisme distribusi sumber daya. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh aktor-aktor formal seperti pejabat publik dan DPRD, tetapi juga oleh aktor informal seperti jaringan keluarga dan kekuatan politik lokal (Hamka et al., 2022). Dalam konteks desentralisasi fiskal di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan besar dalam menetapkan prioritas anggaran. Namun, jika kewenangan tersebut tidak dijalankan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka kebijakan anggaran berisiko mencerminkan kepentingan elit tertentu, bukan kebutuhan masyarakat secara luas. Ketidakefisienan anggaran yang muncul akibat praktik politik yang transaksional dapat memperdalam ketimpangan antardaerah dan memperburuk kondisi kemiskinan struktural. Sebaliknya, strategi fiskal yang inklusif dan responsif mampu menjadi instrumen countercyclical yang efektif dalam merespons krisis serta memperkuat keadilan sosial (Солянникова, 2021). Namun, apabila proses anggaran tidak melibatkan partisipasi publik secara nyata, maka legitimasi kebijakan fiskal dapat terkikis, seperti yang tercermin dalam krisis kepercayaan terhadap institusi di Tunisia (Weipert-Fenner, 2023).

Alokasi anggaran yang tepat terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan. Penelitian di Polandia menunjukkan bahwa peningkatan belanja sosial yang terarah pada kebijakan keluarga dan bantuan sosial berdampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan secara statistik (Maj-Waśniowska & Stabryła-Chudzio, 2020). Selanjutnya, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan juga memiliki kontribusi besar, di mana peningkatan satu persen belanja kesehatan dapat menurunkan kemiskinan hingga 0,48 persen, khususnya di negara-negara dengan tata kelola yang baik (Komarudin & Oak, 2020). Sementara itu, inklusi keuangan menjadi pilar penting dalam

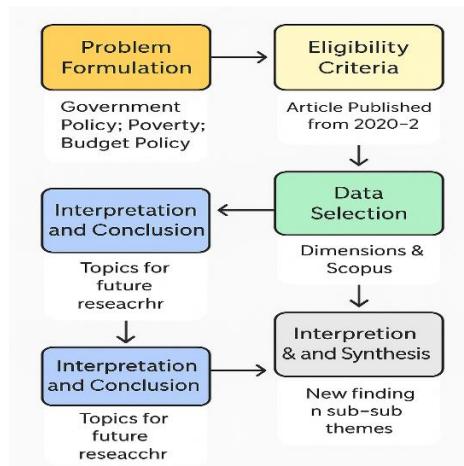
mengatasi kemiskinan, karena memungkinkan kelompok miskin memperoleh akses terhadap pendanaan dan layanan keuangan yang dapat memperkuat kondisi ekonominya (Elumah et al., 2024). Namun demikian, efektivitas dari alokasi ini seringkali terhambat oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas pemerintahan di tingkat implementasi.

Ketimpangan akses terhadap program publik masih menjadi tantangan serius dalam mencapai efektivitas pengentasan kemiskinan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan digital. Di India, akses pendidikan prasekolah sangat dipengaruhi oleh faktor geografis dan status sosial ekonomi, dengan anak-anak dari desa dan kelompok miskin mengalami hambatan terbesar (Choudhury et al., 2023). Demikian pula, studi di Amerika Latin dan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan masih sangat ditentukan oleh tingkat pendapatan, di mana kelompok kaya memiliki peluang layanan lebih besar (Houghton et al., 2020). Di Rusia, ketimpangan digital yang mencolok menyebabkan meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial antardaerah, terutama di wilayah dengan infrastruktur internet yang terbatas (Buchinskaia & Stremousova, 2021). Meskipun beberapa kebijakan nasional telah diarahkan untuk mengurangi kesenjangan ini, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik anggaran dan koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai studi telah menyoroti pentingnya alokasi anggaran dan tata kelola dalam program pengentasan kemiskinan, terdapat celah riset dalam mengintegrasikan secara sistematis hubungan antara politik anggaran, disparitas regional, dan efektivitas program di konteks Indonesia. Selain itu, belum banyak kajian yang menggali bagaimana aktor informal dan kekuasaan lokal berperan dalam mengarahkan prioritas anggaran di tingkat daerah serta dampaknya terhadap distribusi manfaat program sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara kritis bagaimana politik anggaran mempengaruhi efektivitas program pengentasan kemiskinan di Indonesia, serta bagaimana dinamika tersebut berkontribusi terhadap ketimpangan sosial dan pembangunan inklusif.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan semua hasil penelitian yang relevan mengenai Politik Anggaran dan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang relevan secara sistematis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Data dalam penelitian ini bersumber dari database Dimensions (<https://app.dimensions.ai>) dan Scopus (<https://www.scopus.com>) dengan interval publikasi 10 tahun terakhir untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data terkini dan relevan dengan Politik Anggaran dan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Kriteria kelayakan data dalam penelitian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa hanya literatur yang relevan dan berkualitas tinggi yang dianalisis. Kriteria tersebut meliputi (1) artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi; (2) studi yang secara khusus membahas Politik Anggaran dan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia; (3) publikasi yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir (2020-2054); (4) artikel yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Prosedur penelitian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Prosedur penelitian

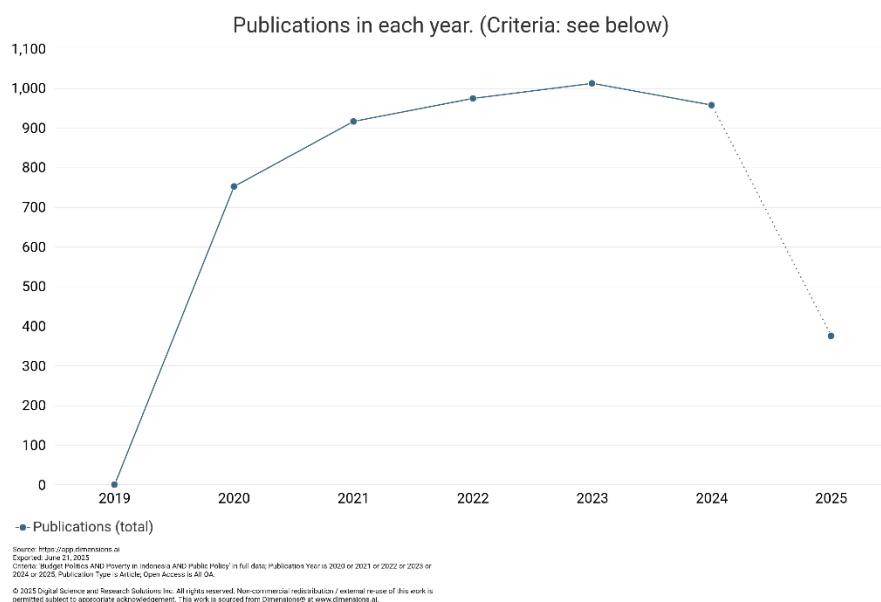
Gambar 1 menunjukkan bahwa penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perumusan masalah, penentuan kriteria kelayakan, seleksi data, analisis data, interpretasi dan sintesis data, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah penting dilakukan untuk membatasi topik yang dibahas, yaitu Politik Anggaran dan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Kriteria kelayakan ditentukan untuk menyaring data yang sesuai dengan topik dengan kata kunci yang relevan seperti "(Kebijakan Pemerintah dan Kemiskinan dan Kebijakan Anggaran) OR (Government Policy AND Poverty AND Budget Policy)". Selanjutnya, data dipilih dari database Dimensi dan filter diterapkan untuk data yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir (2020-2025). Selanjutnya, data yang terkumpul diimpor ke dalam perangkat lunak VOSviewer untuk membuat visualisasi hubungan antara kata kunci dan tema dalam penelitian ini. Hasil visualisasi dan analisis data dari VOSviewer diinterpretasikan untuk menjelaskan variabel-variabel kunci dalam Politik Anggaran dan Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Seleksi Data

Hasil pencarian di database pengindeks menemukan total

161,182 data, meliputi data *Akses terbuka* sebanyak 25,212 data dan sisanya adalah *akses tertutup*. Dari 25,212 data tersebut, terdapat 10,590 data merupakan artikel dan 14,622 data merupakan buku dan prosiding. Dengan demikian, terdapat 4,986 data yang akan dianalisis pada tahap selanjutnya. Sebaran jumlah data tersebut sesuai dengan Gambar 2.



Gambar 2. Distribusi jumlah data selama satu lustrum

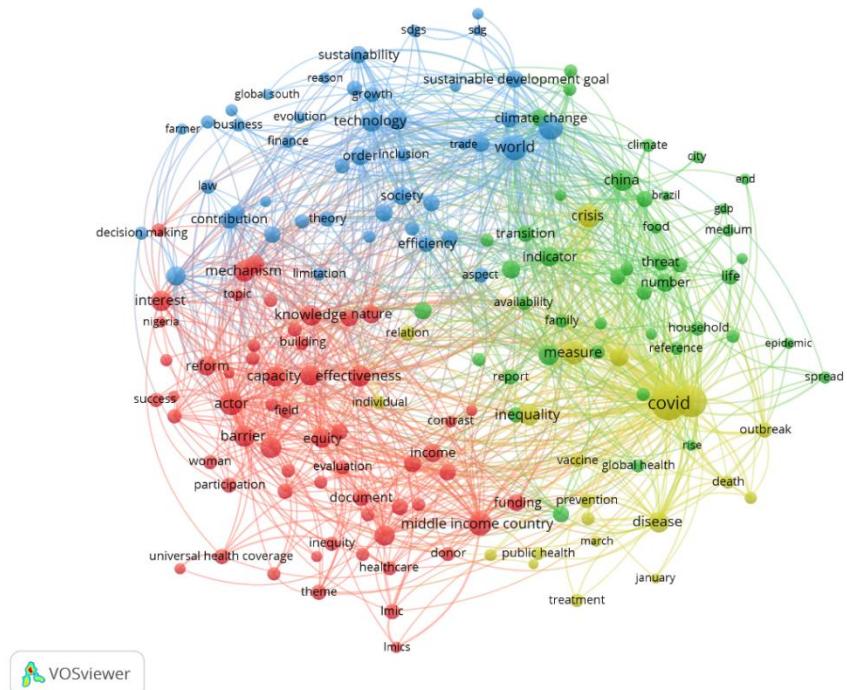
Gambar 2 menunjukkan bahwa tren jumlah publikasi tahunan yang membahas isu "Politik Anggaran dan Kemiskinan di Indonesia dalam Kebijakan Publik" berdasarkan data dari Dimensions.ai. Terlihat bahwa pada tahun 2019, publikasi terkait topik ini nyaris tidak ada, namun mulai tahun 2020 terjadi lonjakan tajam hingga mencapai sekitar 750 publikasi. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah publikasi masing-masing meningkat menjadi sekitar 920 dan 980, mencerminkan tumbuhnya perhatian akademik terhadap keterkaitan antara politik anggaran, kemiskinan, dan kebijakan publik di Indonesia.

Puncak publikasi terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah melebihi 1.000 artikel, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh kompleksitas tantangan sosial-ekonomi pascapandemi serta meningkatnya urgensi reformasi fiskal dan perlindungan sosial. Pada tahun 2024, jumlah publikasi mulai menunjukkan sedikit penurunan, meskipun tetap berada pada angka yang tinggi. Namun, data untuk tahun 2025 menunjukkan penurunan yang sangat tajam hingga ke angka sekitar 380 publikasi. Penurunan ini perlu diinterpretasikan secara hati-hati, karena data untuk tahun 2025 hanya dihimpun hingga pertengahan tahun (21 Juni 2025), sehingga jumlah publikasi belum mencerminkan akumulasi tahunan secara penuh.

Pandemi Covid-19 telah memperlihatkan bahwa pemerintah tidak dapat secara sendirian menangani kompleksitas permasalahan dan pemulihan dari bencana non-alam. Respon terhadap krisis ini menuntut kolaborasi multipihak, di mana Non-Governmental Organizations (NGO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sektor swasta, militer, organisasi kemasyarakatan, masyarakat sipil, hingga media berperan aktif dalam merespons, mengatasi dampak, dan memframing persoalan sosial-ekonomi yang muncul (Pratama, 2023b), 2021). Realitas ini memperkuat pentingnya pendekatan kebijakan publik yang inklusif dan adaptif, termasuk dalam praktik politik anggaran. Seiring dengan itu, tren akademik dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan minat terhadap isu politik anggaran dan pengentasan kemiskinan, terutama sebagai respons atas kebutuhan solusi kebijakan selama pandemi COVID-19. Namun, penurunan tren di tahun 2025 dapat menjadi sinyal perlunya revitalisasi fokus riset yang lebih kolaboratif dan transdisipliner, guna mendukung reformasi kebijakan fiskal yang berkelanjutan serta penguatan ketahanan sosial di masa mendatang.

2. Network Visualization of Data

Data yang telah melalui proses seleksi kemudian divisualisasikan dengan menggunakan VOSviewer untuk melihat variabel-variabel penelitian dan hubungan antar variabel. Hasil visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.

**Gambar 3.** Network visualization dari variabel penelitian

Gambar 3 merupakan visualisasi jaringan dari seluruh variabel yang dikaji selama 5 tahun terakhir dan menggambarkan empat kelompok warna yang berbeda: hijau, merah, kuning, dan biru. Interpretasi masing-masing variabel adalah sebagai berikut. Klaster Hijau (Krisis Global, Ketahanan Sosial, dan Transisi)

Kata kunci seperti *crisis*, *climate change*, *transition*, *indicator*, *availability*, *food*, *family*, *city*, *gdp*, *household* dan *inequality* mencerminkan perhatian pada dinamika perubahan global yang bersifat krisis, baik dari aspek perubahan iklim maupun ketahanan pangan dan sosial. Klaster ini menunjukkan fokus pada transisi sistemik menuju ketahanan sosial dan ekologis, termasuk respons terhadap perubahan struktural dalam masyarakat.

a. Klaster Biru (Transformasi Teknologi, Inklusi, dan Pembangunan Berkelanjutan)

Klaster biru mencakup kata kunci seperti *technology, innovation, efficiency, sustainability, sustainable development goal (SDGs), inclusion, society, theory, dan growth*. Fokus utamanya adalah pada interseksi antara transformasi teknologi dan pembangunan inklusif. Klaster ini menyoroti bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen efisiensi dan inklusi sosial dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

b. Klaster Merah (Isu Struktural dan Kelembagaan dalam Efektivitas Kebijakan)

Kata kunci seperti *crisis, climate change, transition, indicator, availability, food, family, city, gdp, household* dan *inequality* mencerminkan perhatian pada dinamika perubahan global yang bersifat krisis, baik dari aspek perubahan iklim maupun ketahanan pangan dan sosial. Klaster ini menunjukkan fokus pada transisi sistemik menuju ketahanan sosial dan ekologis, termasuk respons terhadap perubahan struktural dalam masyarakat.

c. Klaster Kuning (Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Kesehatan Global dan Ketimpangan)

Klaster kuning secara dominan dikelilingi oleh kata *covid, disease, death, outbreak, treatment, prevention, vaccine, global health, funding, threat, dan measure*. Ini mengindikasikan konsentrasi perhatian terhadap dampak pandemi COVID-19, baik dari sisi epidemiologis, pembiayaan kesehatan global, ketimpangan akses vaksin, hingga peran negara dalam mitigasi dan respons krisis kesehatan.

Based on the cluster division, researchers can make a more in-depth study of several topics as follows.

a. Efektivitas kebijakan publik dalam konteks ketimpangan stuktural

Kapasitas kelembagaan memegang peran strategis dalam implementasi kebijakan kesehatan yang berbasis bukti.

Kekuatan lembaga dalam memobilisasi sumber daya, mengoordinasikan aksi, dan melibatkan pemangku kepentingan menjadi prasyarat utama agar temuan riset dapat diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan dan program publik. Intervensi penguatan kapasitas, seperti pelatihan terstruktur dan program mentorship yang diselenggarakan oleh institusi akademik, terbukti meningkatkan kompetensi implementatif (Juckett et al., 2022). Sebagai contoh, pelatihan tatap muka bagi para peneliti di Iran berhasil memperkuat kemampuan mereka dalam merancang kebijakan berbasis bukti (Doshmangir et al., 2022). Dalam konteks manajemen krisis, kapasitas tata kelola lembaga di tingkat lokal turut menentukan kecepatan dan efektivitas respons terhadap pandemi, seperti yang tampak pada perbedaan respons COVID-19 antar-provinsi di Tiongkok (Mao, 2023), 2023. Negara dengan kapasitas kelembagaan yang tinggi, seperti Singapura dan Taiwan, mampu mengerahkan sumber daya serta mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan dengan cepat dan terkoordinasi (Yen et al., 2022).

Negara-negara berpenghasilan menengah (middle-income countries/MICs) menghadapi tantangan serius berupa ketimpangan sosial dan hambatan struktural yang berdampak pada akses serta hasil layanan kesehatan. Hambatan ini tidak hanya bersumber dari kendala ekonomi, tetapi juga norma gender dan keyakinan budaya yang memperkuat eksklusi terhadap kelompok rentan. Misalnya, kepercayaan tradisional yang keliru sering kali menghalangi perempuan untuk mengakses layanan kesehatan penting seperti skrining kanker serviks (Petersen et al., 2022). Selain itu, sistem kesehatan yang kurang terorganisasi dan kebijakan yang tidak memadai memperburuk ketimpangan akses (Campbell et al., 2020). Ketimpangan ekonomi berkontribusi terhadap kerentanan terhadap risiko kesehatan, sebagaimana terlihat dari tingginya angka kematian akibat banjir di masyarakat dengan kesenjangan pendapatan yang tinggi (Lindersson et al., 2023). Status sosial ekonomi juga memengaruhi gaya hidup dan risiko penyakit,

dengan kelompok miskin lebih rentan terhadap konsumsi tembakau dan alkohol, sementara kelompok kaya lebih rentan mengalami obesitas Ketimpangan gender menambah lapisan kerentanan, terutama melalui peningkatan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta ketidakamanan ekonomi (Suárez-Álvarez & López-Menéndez, 2022).

Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa kapasitas kelembagaan dan ketimpangan struktural merupakan determinan utama dalam keberhasilan program kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks Indonesia, politik anggaran memainkan peran sentral dalam menentukan sejauh mana lembaga kesehatan dan sosial mampu merespons kebutuhan masyarakat rentan. Lemahnya alokasi dan penggunaan anggaran untuk peningkatan kapasitas birokrasi, pelatihan kebijakan berbasis bukti, serta tata kelola pelayanan publik akan terus menjadi hambatan sistemik terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan. Ketimpangan pendapatan, gender, dan akses terhadap layanan dasar di Indonesia menunjukkan pola yang sejalan dengan tantangan di MICs lainnya, di mana kebijakan seringkali bersifat reaktif dan tidak transformatif. Oleh karena itu, reformasi politik anggaran yang berorientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan kelembagaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan tidak hanya mencapai target output, tetapi juga memperbaiki struktur sosial dan ketimpangan jangka panjang.

b. Inovasi Teknologi sebagai Instrumen Pembangunan Inklusif

Teknologi memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi dan memperluas inklusi sosial, khususnya di sektor pendidikan, keuangan, dan layanan sosial. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan melalui sumber daya pendidikan terbuka (*Open Educational Resources* atau OER) telah memperluas akses terhadap materi pembelajaran di negara berkembang ((Mncube

et al., 2021) et al., 2021). Di sektor keuangan, TIK memungkinkan penurunan biaya transaksi dan memperluas akses layanan keuangan kepada kelompok-kelompok marginal, sehingga memperkuat inklusi finansial ((Mao, 2023), 2023). Selain itu, teknologi media sosial memfasilitasi partisipasi sosial dan akses layanan bagi individu dengan keterbatasan mobilitas, yang pada gilirannya memperkuat hubungan sosial mereka (Yang & Lin, 2022). Namun demikian, teknologi juga memiliki potensi memperkuat eksklusi sosial, terutama di wilayah dengan infrastruktur TIK yang belum memadai (Mncube et al., 2021), serta bagi individu dengan disabilitas belajar yang membutuhkan dukungan dan pelatihan khusus untuk berpartisipasi dalam ruang digital (Chadwick et al., 2023) et al., 2023).

Integrasi teknologi dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) membawa tantangan kompleks yang memerlukan tata kelola dan kebijakan yang terkoordinasi secara lintas sektor. Kompleksitas ini terutama terlihat pada isu-isu seperti pertanian urban yang memerlukan integrasi kebijakan antara teknologi, pangan, dan air (Schwindenhammer & Gonglach, 2021). Tantangan lainnya mencakup isu privasi dan keamanan data yang ditimbulkan oleh teknologi seperti *Internet of Things* (IoT) dan *machine learning*, yang dapat menggerus kepercayaan publik dan menciptakan hasil kebijakan yang bias terhadap kelompok rentan (Jaber, 2023), 2023). Di samping itu, kesenjangan dalam pendidikan teknologi serta kurangnya keterampilan digital di tingkat masyarakat menjadi penghambat utama dalam memanfaatkan teknologi secara efektif untuk pembangunan berkelanjutan (Hafel & Ibrahim, 2024), 2024). Oleh karena itu, pendidikan berbasis penguatan kapasitas menjadi komponen esensial agar teknologi tidak menjadi hambatan, melainkan pengungkit transformasi sosial.

Hasil-hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa teknologi merupakan instrumen potensial untuk mendorong

efisiensi dan inklusi dalam program pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas pemanfaatannya sangat bergantung pada arah politik anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Di Indonesia, pengalokasian anggaran untuk transformasi digital, pendidikan teknologi, dan infrastruktur TIK di daerah tertinggal masih belum optimal, sehingga potensi teknologi untuk memperluas akses layanan pendidikan, keuangan, dan kesehatan belum sepenuhnya terwujud. Jika politik anggaran tidak diarahkan untuk menutup kesenjangan digital dan membangun kapasitas masyarakat, maka teknologi justru dapat memperkuat ketimpangan sosial yang telah ada. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan, diperlukan kebijakan anggaran yang berpihak pada pembangunan infrastruktur digital yang merata, pelatihan keterampilan teknologi berbasis komunitas, serta penerapan regulasi yang menjamin keadilan digital dan keamanan data bagi semua kelompok masyarakat.

c. Krisis Global dan Respons Kesehatan Publik dalam Pandemi COVID-19

Ketimpangan dalam distribusi dan akses vaksin di negara berkembang, khususnya selama pandemi COVID-19, mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam sistem kesehatan global. Negara-negara dengan sistem kesehatan yang lemah dan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan dalam pendistribusian vaksin secara merata (& López-Menéndez, 2022). Disparitas ekonomi juga memainkan peran penting, di mana negara-negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) rendah memiliki tingkat vaksinasi yang lebih rendah, yang pada akhirnya memperlambat pemulihan ekonomi mereka. Di samping itu, hesitansi terhadap vaksin akibat kurangnya kepercayaan publik dan informasi yang keliru turut memperburuk ketimpangan kesehatan ((Kunyenje et al., 2023) et al., 2023). Upaya global seperti inisiatif COVAX telah dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini, namun masih menghadapi tantangan serius, termasuk keterbatasan pasokan

dan dominasi negara-negara maju dalam pengadaan vaksin (Fassler et al., 2022) et al., 2022; Li, 2022).

Krisis kesehatan global telah menyoroti pentingnya pembiayaan kesehatan dan perlunya membangun ketahanan sistem kesehatan sebagai respons terhadap tantangan transnasional. Sayangnya, sistem kesehatan global saat ini masih mengalami fragmentasi dalam mekanisme pembiayaan, yang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam alokasi sumber daya (Borghi & Brown, 2022) & Brown, 2022). Di sisi lain, ketidaktransparanan harga obat dan alat kesehatan memperburuk ketimpangan akses. Untuk meningkatkan ketahanan, strategi seperti pelibatan komunitas lokal, pengembangan layanan kesehatan jarak jauh, serta penguatan tata kelola dan kepemimpinan kesehatan telah diidentifikasi sebagai komponen penting (Forsgren et al., 2022). Meski demikian, terdapat risiko bahwa ketergantungan berlebihan pada strategi adaptif dapat menyebabkan pengabaian terhadap elemen-elemen dasar sistem kesehatan, seperti infrastruktur fisik dan ketersediaan tenaga medis.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan struktural dalam sistem kesehatan global, termasuk dalam distribusi vaksin dan pembiayaan layanan kesehatan, memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Politik anggaran yang tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat miskin, seperti akses terhadap layanan kesehatan dasar, vaksinasi, dan teknologi layanan jarak jauh, akan memperburuk kerentanan sosial-ekonomi. Di Indonesia, alokasi anggaran kesehatan yang masih rendah terhadap PDB serta ketimpangan antarwilayah dalam infrastruktur kesehatan menyebabkan program perlindungan sosial sulit mencapai efektivitas optimal. Oleh karena itu, pergeseran paradigma anggaran yang menekankan integrasi antara penguatan sistem kesehatan dan pembangunan sosial menjadi sangat krusial. Tanpa reformasi kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok rentan, upaya pengentasan

kemiskinan akan terhambat oleh ketidakmampuan negara dalam melindungi warganya dari dampak krisis kesehatan dan ekonomi secara simultan.

D. Kesimpulan

Kapasitas kelembagaan yang kuat dan pengurangan ketimpangan struktural terbukti menjadi fondasi utama dalam keberhasilan program kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, arah dan kualitas politik anggaran sangat menentukan efektivitas intervensi sosial, terutama dalam menjawab kebutuhan kelompok rentan secara berkelanjutan. Tanpa penguatan institusi publik dan alokasi anggaran yang berpihak pada keadilan sosial, upaya pengentasan kemiskinan berisiko stagnan dan gagal mengatasi akar ketimpangan jangka panjang.

Penelitian mendalam diperlukan untuk mengevaluasi hubungan kausal antara kualitas tata kelola anggaran dan dampaknya terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. Selain itu, kajian komparatif atas model reformasi fiskal yang berhasil di negara MICs lainnya dapat memberikan inspirasi kebijakan yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi Indonesia. Teknologi memiliki potensi strategis dalam mendukung efisiensi dan inklusi sosial dalam program pengentasan kemiskinan. Namun, tanpa dukungan politik anggaran yang adil dan terarah, potensi tersebut sulit direalisasikan dan bahkan dapat memperparah kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang fokus pada pembangunan infrastruktur digital dan penguatan kapasitas masyarakat menjadi prasyarat utama bagi keberhasilan transformasi digital yang inklusif di Indonesia.

Diperlukan kajian empiris mengenai dampak alokasi anggaran teknologi terhadap pencapaian indikator pengentasan kemiskinan di wilayah tertinggal. Selain itu, riset partisipatif yang menggali efektivitas program pelatihan keterampilan digital berbasis komunitas dapat menjadi dasar untuk perumusan kebijakan pembangunan digital yang berkeadilan. Ketimpangan struktural

dalam sistem kesehatan, termasuk dalam distribusi vaksin dan pembiayaan layanan, berdampak langsung pada rendahnya efektivitas program pengentasan kemiskinan di negara berkembang seperti Indonesia. Politik anggaran yang tidak adaptif terhadap kebutuhan dasar kelompok miskin memperbesar kerentanan sosial dan menghambat respons negara terhadap krisis kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Reformasi kebijakan fiskal yang integratif dan berpihak pada kelompok rentan menjadi syarat mutlak untuk mencapai keadilan sosial dan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan.

Dibutuhkan penelitian lintas sektor mengenai pengaruh alokasi anggaran kesehatan terhadap efektivitas perlindungan sosial di daerah miskin dan terpencil. Selain itu, evaluasi terhadap integrasi kebijakan fiskal dan sistem kesehatan dalam kerangka penanggulangan kemiskinan pascakrisis merupakan agenda penting untuk merumuskan desain kebijakan yang lebih resilien dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Borghi, J., & Brown, G. W. (2022). Taking Systems Thinking to the Global Level: Using the WHO Building Blocks to Describe and Appraise the Global Health System in Relation to COVID-19. *Global Policy*, 13(2), 193–207. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13081>
- Buchinskaia, O., & Stremousova, E. (2021). Inequality of digital access between Russian regions. *E3S Web of Conferences*, 301. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202130105001>
- Campbell, L., Masquillier, C., Thunnissen, E., Ariyo, E., Tabana, H., Sematlane, N., Delport, A., Dube, L. T., Knight, L., Flechner, T. K., & Wouters, E. (2020). Social and structural determinants of household support for ART adherence in low- and middle-income countries: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(11), 1–28. <https://doi.org/10.3390/ijerph17113808>

- Chadwick, D., Richards, C., Molin, M., & Strnadová, I. (2023). Digital inclusion and people with learning disabilities. *British Journal of Learning Disabilities*, 51(2), 119–124.
<https://doi.org/10.1111/bld.12530>
- Choudhury, P. K., Joshi, R., & Kumar, A. (2023). Regional and socioeconomic inequalities in access to pre-primary education in India: evidence from a recent household survey. *International Journal of Child Care and Education Policy*, 17(1).
<https://doi.org/10.1186/s40723-023-00117-4>
- Doshmangir, L., Mostafavi, H., Behzadifar, M., Yazdizadeh, B., Sajadi, H. S., Hasanpoor, E., Mahdavi, M., & Majdzadeh, R. (2022). Individual and institutional capacity-building for evidence-informed health policy-making in Iran: a mix of local and global evidence. *Health Research Policy and Systems*, 20(1), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s12961-022-00816-3>
- Fassler, E., Larkin, A., Nayar, K. R., & Waitzkin, H. (2022). Using absolute risk reduction to guide the equitable distribution of COVID-19 vaccines. *BMJ Evidence-Based Medicine*, 27(6), 330–333. <https://doi.org/10.1136/bmjebm-2021-111789>
- Forsgren, L., Tediosi, F., Blanchet, K., & Saulnier, D. D. (2022). Health systems resilience in practice: a scoping review to identify strategies for building resilience. *BMC Health Services Research*, 22(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12913-022-08544-8>
- Hafel, M., & Ibrahim, A. H. H. (2024). Budget politics in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 11(4), 159–168.
<https://doi.org/10.21744/irjmis.v11n4.2457>
- Houghton, N., Bascolo, E., & Del Riego, A. (2020). Socioeconomic inequalities in access barriers to seeking health services in four Latin American countries. *Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American Journal of Public Health*, 44, 1–9.
<https://doi.org/10.26633/RPSP.2020.11>
- Jaber, M. (2023). IoT and machine learning for enabling sustainable development goals. *Frontiers in Communications and Networks*, 4(July), 1–16. <https://doi.org/10.3389/frcmn.2023.1219047>

- Juckett, L. A., Bunger, A. C., McNett, M. M., Robinson, M. L., & Tucker, S. J. (2022). Leveraging academic initiatives to advance implementation practice: a scoping review of capacity building interventions. *Implementation Science*, 17(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1186/s13012-022-01216-5>
- Kunyenje, C. A., Chirwa, G. C., Mboma, S. M., Ng'ambi, W., Mnjowe, E., Nkhoma, D., Ngwira, L. G., Chawani, M. S., Chilima, B., Mitambo, C., Crampin, A., & Mfutso-Bengo, J. (2023). COVID-19 vaccine inequity in African low-income countries. *Frontiers in Public Health*, 11(5).
<https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1087662>
- Lindersson, S., Raffetti, E., Rusca, M., Brandimarte, L., Mård, J., & Di Baldassarre, G. (2023). The wider the gap between rich and poor the higher the flood mortality. *Nature Sustainability*, 6(8), 995–1005. <https://doi.org/10.1038/s41893-023-01107-7>
- Maj-Waśniowska, K., & Stabryła-Chudzio, K. (2020). Wpływ wydatków budżetowych na zmniejszanie ubóstwa w Polsce. *Zeszyty Naukowe SGH, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing*, 23(23(72)), 95–112.
<https://doi.org/10.22630/pefim.2020.23.72.8>
- Mao, Y. (2023). What accounts for the different regional responses to COVID-19 in China? Exploring the role of institutional environment, governance capacity and legitimacy. *Health Policy and Planning*, 38(4), 552–566.
<https://doi.org/10.1093/heapol/czad007>
- Mncube, L. S., Tanner, M., & Chigona, W. (2021). The Contribution of Information and Communication Technology to Social Inclusion and Exclusion during the Appropriation of Open Educational Resources. *International Journal of Higher Education*, 10(6), 245. <https://doi.org/10.5430/ijhe.v10n6p245>
- Petersen, Z., Jaca, A., Ginindza, T. G., Maseko, G., Takatshana, S., Ndlovu, P., Zondi, N., Zungu, N., Varghese, C., Hunting, G., Parham, G., Simelela, P., & Moyo, S. (2022). Barriers to uptake of cervical cancer screening services in low-and-middle-income countries: a systematic review. *BMC Women's Health*, 22(1).
<https://doi.org/10.1186/s12905-022-02043-y>

- Pratama, I. N. (2023a). Dinamika Kemiskinan di Kota Mataram: Analisis Perubahan Tingkat Kemiskinan Dalam Dekade Terakhir. *Seminar Nasional LPPM UMMAT*, 2(April), 1216–1222.
- Pratama, I. N. (2023b). Skema Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Collaborative Governance Di Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), 61–77.
<https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.221>
- Schwindenhammer, S., & Gonglach, D. (2021). Sdg implementation through technology? Governing food-water-technology nexus challenges in urban agriculture. *Politics and Governance*, 9(1), 176–186. <https://doi.org/10.17645/pag.v9i1.3590>
- Smith, M. R., Pratama, I. N., Silmi, H., Winardi, D., Pratama, W., Alam, N., Saputra, A., Surya, L. D., Pratama, A. A., & Mataram, U. M. (2025). *Nusantara Hasana Journal*. 4(9), 9–22.
- Suárez-Álvarez, A., & López-Menéndez, A. J. (2022). Is COVID-19 vaccine inequality undermining the recovery from the COVID-19 pandemic? *Journal of Global Health*, 12, 1–8.
<https://doi.org/10.7189/JOGH.12.05020>
- Yang, L., & Lin, Z. (2022). The Impact of “Social Networking +” Technology on the Social Inclusion of People With Mobility Impairments in China. *Social Media and Society*, 8(1).
<https://doi.org/10.1177/20563051221077016>
- Yen, W. T., Liu, L. Y., Won, E., & Testriono. (2022). The imperative of state capacity in public health crisis: Asia's early COVID-19 policy responses. *Governance*, 35(3), 777–798.
<https://doi.org/10.1111/gove.12695>